SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i5.6430

*Vol. 5, No. 5, May 2026*
*e-ISSN:* 2963-1130
*pp. 2871-2891*

# Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020-2024

**Susanti Usman[1*], Nila Savitri[1]**
[1]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Indonesia

*Corresponding Author's email: susanti_usman@staff.gunadarma.ac.id

**Article History:**
*Received: May 02, 2026*
*Revised: May 19, 2026*
*Accepted: May 31, 2026*

**Keywords:**
*Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ekonomis, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan*

***Abstract:*** Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan keuangan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis berdasarkan penilaian *Value for Money,* Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan pada Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024. Metode penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif deskriptif dan sumber data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari website resmi pemerintah yaitu https://djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal termasuk dalam kriteria kurang, rasio kemandirian termasuk dalam kriteria instruktif, rasio efektivitas termasuk dalam kriteria sangat efektif, rasio efisiensi termasuk dalam kriteria kurang efisien, rasio ekonomis termasuk dalam kriteria ekonomis, rasio keserasian masih memprioritaskan belanja operasi, dan hasil rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan yang bervariasi dan belum stabil dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan analisis rasio keuangan sudah cukup baik, meskipun masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

***How to cite:*** Usman, S., & Savitri, N. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020-2024. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(5), 2871–2891. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i5.6430

## PENDAHULUAN

Kinerja keuangan daerah menjadi nilai keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Majid, 2019:2). Tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut dapat terjadi jika adanya pelaksanaan otonomi daerah yang baik (Lestari & Nugroho, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Otonomi daerah diberikan kepada daerah provinsi dan

kabupaten atau kota dalam rangka mempercepat kesejahteraan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja pemerintah daerah, salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Sawitri & Usman, 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan laporan keuangan pemerintah selama jangka waktu tertentu, yang menggambarkan tentang kapabilitas pemerintah dengan tujuan pelaporan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keluaran hasil APBD dapat diolah menjadi informasi untuk mengetahui perhitungan kinerja keuangan pemerintah berdasarkan indikator keuangan yang digunakan (Nansi et al., 2025). Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan. Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (Mahmudi, 2016:143). Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Saragih & Siregar, 2020).

Metode yang bisa di gunakan dalam menganalisa laporan keuangan yakni melalui perhitungan rasio keuangan antara lain: 1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah, 3) Rasio Efektivitas yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. 4) Rasio Efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, 5) Rasio Ekonomis digunakan untuk menilai tingkat penghematan anggaran, dengan membandingkan input anggaran dan realisasi pengeluaran untuk melihat sejauh mana penggunaan sumber daya dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas layanan, 6) Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan mengenai bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal, 7) Rasio Pertumbuhan yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2019:140-147).

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu penelitian Nansi et al., (2025) menemukan bahwa kinerja keuangan di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2020-2023 mengalami peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan, terutama pada rasio kemandirian dan efektivitas. Kota Yogyakarta berhasil menjaga stabilitas keuangan dan efisiensi anggaran, namun perlu perhatian lebih pada alokasi belanja modal untuk pembangunan jangka panjang. Penelitian Sugiarto & Silvi (2025) menemukan bahwa kinerja keuangan di Kota Malang tahun anggaran 2019-2023 untuk

pertumbuhan PAD menurun dan ketergantungan pada pendapatan transfer. Penelitian ini mengambil Kabupaten Wonogiri secara spesifik dengan pendekatan deksriptif kuantitatif dengan rentang waktu yang terkini. Penelitian ini mencakup lima tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2020-2024, termasuk masa pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah. Penelitian ini mengambil Kabupaten Wonogiri karena merupakan salah satu daerah kaya di Soloraya dan Jawa Tengah. Kesadaran rakyat Wonogiri sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk membangun daerah yang dulunya tandus menjadi daerah yang potensial di bidang ekonomi, sosial kebudayaan pariwisata, dan olahraga. Selain itu Kabupaten Wonogiri terkenal dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang secara keseluruhan menjadi kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah serta memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (https://wonogirikab.go.id). Kabupaten Wonogiri memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung, kedelai, dan singkong di Jawa Tengah. Keberadaan Waduk Gajah Mungkur menjadi sumber utama bagi perikanan air tawar, irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendali banjir, dan objek wisata. Pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memahami efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri (https://wonogirikab.go.id).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam menilai seberapa jauh daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kinerja PAD Kabupaten Wonogiri menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun anggaran 2020-2024. Tahun 2020, realisasi PAD mencapai Rp274.290.000.000, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp252.340.000.000. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021, di mana realisasi hanya sebesar Rp241.300.000.000 dari target sebesar Rp258.240.000.000. Penurunan ini diduga kuat disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Kondisi berbalik secara signifikan pada tahun 2022, ketika PAD Kabupaten Wonogiri mengalami lonjakan realisasi sebesar Rp332.810.000.000, jauh melebihi target anggaran sebesar Rp251.870.000.000. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi daerah serta peningkatan efektivitas pengelolaan PAD. Fenomena fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan PAD masih menghadapi berbagai tantangan, namun juga menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang mendalam terhadap kinerja PAD Kabupaten Wonogiri.

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:18) Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Pelayanan untuk publik dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat (Hantono, 2021:3). Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam suatu negara yaitu untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pelaporan, pemeriksaan, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan teori

dan praktik akuntansi sektor publik harus terus dilakukan untuk mencapai kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2016:22).

**Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing (Putro, Suniaprily, & Suharno, 2024). Kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana daerah mampu menjalankan otonomi secara nyata. Teori otonomi daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelibatan masyarakat.

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mardiasmo (2018:203) Tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan keuangan digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Perbedaan antara format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hanyalah beberapa elemen atau komponen aset pada laporan posisi keuangan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas. Format dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas sama untuk pemerintah pusat dan daerah.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur, layanan dasar, dan pengentasan kemiskinan. Efektivitas APBD sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan belanja secara optimal (Yuliana & Ardiansyah, 2020).

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode

pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas, meskipun dapat juga berbasis akrual yang bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016:127). Informasi LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

**Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah yang baik merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah (Muslim, Saenong, & Hastuti, 2023). Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktivitas pelayanan publik. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Daerah yang mampu mengelola keuangan dengan efisien cenderung memiliki program pelayanan yang lebih luas dan berkualitas (Yuliana, 2020).

**Konsep *Value for Money***

*Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendahdan efesiensi pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dengan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output.*

**Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2016:163), Analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.

Rasio keuangan pada umumnya ada beberapa macam tergantung kepada kepentingan dan penggunaannya, begitu pula perbedaan jenis Analisa dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasionya (Santoso et al., 2021). Rasio keuangan daerah yang bisa digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio dengan penilaian *Value for Money* (VFM) yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Ekonomis. Rasio keuangan ini dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan jenis laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran (Awani & Hariani, 2021).

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

   Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya. Menurut Mahmudi (2019:140), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019 (dalam Sawitri & Usman, 2023)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah daerah bergantung pada dana eksternal, seperti yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi (Nansi et al., 2025). Menurut Mahmudi (2016:170), Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019 (dalam Sawitri & Usman, 2023)

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan penilaian *Value for Money*

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerima PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Mahmudi, 2016:170). Rasio Efektivitas PAD ini dapat di artikan dengan bertambah banyak nilai rasio efektivitas PAD, berarti bertambah baik kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola PAD (Sampow & Pangkey, 2022). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019 (dalam Fadhila & Tanjung, 2022)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berdasarkan penilaian *Value for Money*

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan (Mahmudi, 2016:171). Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2019:164 (dalam Rustanto et al., 2020)

5. Rasio Ekonomis berdasarkan penilaian *Value for Money*

   Rasio ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio ekonomis dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \text{ x } 100\%$$

   Sumber: Mahmudi, 2019 (dalam Fadhila & Tanjung, 2022)

6. Rasio Keserasian

   Rasio keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

7. Rasio Pertumbuhan

   Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Sugiarto & Oktaviani, 2025). Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif artinya daerah beum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya (Sawitri & Usman, 2023). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

   Sumber: Mahmudi, 2019:137 (dalam Sawitri & Usman, 2023)

   *r* = Rasio Pertumbuhan
   *Pn* = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n
   Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/Belanja
   *P0* = Operasi yang dihitung pada tahun ke-0

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024. Peneliti menganalisis kinerja keuangan daerah yang diukur dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Efisiensi berdasarkan

penilaian *Value for Money*, Rasio Ekonomis berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian , sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. (wonogirikab.go.id).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dekriptif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah sebuah pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah metode kuantitatif (Setiawan & Wulandari, 2025). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 yang dipublikasikan untuk umum dan diperoleh melalui website resmi pemerintah yaitu https://www.djpk.kemenkeu.go.id/. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dalam penyususan penelitian ilmiah ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber dengan metode penulisan studi pustaka dan dokumentasi data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 yang dipublikasikan melalui https://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

**Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berdasarkan penilaian *Value For Money*, Rasio Ekonomis berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pembahasan**

Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonogir i dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Kabupaten Wonogiri dalam bidang keuangan tahun anggaran 2020-2024. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pengelolaan kinerja keuangan Kabupaten Wonogiri pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berdasarkan penilaian *Value For Money*, Rasio Ekonomis berdasarkan penilaian *Value for Money*, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang didapat dari website resmi departemen keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id dan https://www.wonogirikab.go.id. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri berdasarkan Rasio sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

**Tabel 1**
**Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD (Rupiah) | Total Pendapatan (Rupiah) | Hasil (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 274.290.000.000 | 2.273.680.000.000 | 12,06 | Kurang |
| 2021 | 241.300.000.000 | 2.303.560.000.000 | 10,47 | Kurang |
| 2022 | 332.810.000.000 | 2.262.260.000.000 | 14,71 | Kurang |
| 2023 | 249.530.000.000 | 2.351.130.000.000 | 10,61 | Kurang |
| 2024 | 306.540.000.000 | 2.473.360.000.000 | 12,39 | Kurang |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 2020-2024 mengalami fluktuasi penurunan dan kenaikan. Tahun 2020, rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Wonogiri menunjukkan sebesar 12,06% dengan kriteria kurang, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 10,47%, yang masih termasuk kriteria kurang. Selanjutnya pada tahun 2022 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan mencapai angka tertinggi yaitu 14,71% namun masih dalam kriteria kurang, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 10,61%, lalu untuk tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan sebesar 12,39% dan masih berada di kriteria kurang atau rendah.

Berdasarkan tren ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kemampuan kinerja keuangan Kabupaten Wonogiri selama lima tahun berturut-turut rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Wonogiri tidak pernah mencapai 20%. Meski ada perbaikan pada tahun 2022 dan 2024, daerah ini masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Kabupaten Wonogiri belum mampu menggali dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal selama periode 2020-2024.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu mengembangkan potensi PAD, misalnya melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi, perbaikan tata kelola fiskal, dan kajian lebih mendalam tentang potensi ekonomi lokal Wonogiri (pariwisata, pertanian, UMKM) bisa menjadi arah untuk memperbesar PAD. Berdasarkan analisis selama tahun anggaran 2020-2024, rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata rasio 12,05% dan tergolong kriteria kurang. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2022, kemungkinan sebagai hasil intensifikasi pemungutan pajak. Namun, penurunan kembali pada tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum konsisten dan masih rentan terhadap perubahan regulasi (https://wonogirikab.go.id.)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 2**
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD (Rupiah) | Total Transfer (Rupiah) | Hasil (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 274.290.000.000 | 1.886.890.000.000 | 14,54 | Instruktif |
| 2021 | 241.300.000.000 | 1.926.980.000.000 | 12,52 | Instruktif |
| 2022 | 332.810.000.000 | 1.926.880.000.000 | 17,27 | Instruktif |
| 2023 | 249.530.000.000 | 2.100.100.000.000 | 11,88 | Instruktif |
| 2024 | 306.540.000.000 | 2.166.820.000.000 | 14,15 | Instruktif |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan data yang ditunjukkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Wonogiri yang dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total transfer mengalami tren cenderung fluktuatif sepanjang tahun anggaran 2020-2024. Tahun 2020, rasio kemandirian tercatat sebesar 14,54% dengan kriteria yang bersifat instruktif, lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12,52% dengan kriteria yang masih sama yaitu instruktif. Selanjutnya tahun 2022 tercatat sebesar 17,27% dinyatakan mengalami kenaikan dengan kriteria instruktif. Kemudian tahun 2023 rasio kemandirian ini mengalami penurunan menjadi 11,88%, lalu kembali meningkat tahun 2024 menjadi 14,15%.

Berdasarkan tren ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Wonogiri selama lima tahun terakhir masih di bawah 25% yaitu dengan rata-rata rasio 14,07% yang tergolong kriteria instruktif, yaitu di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah/daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah (Mahmudi, 2019:140). Kabupaten Wonogiri juga masih terbatas dalam membiayai sendiri pembangunan dan layanan publik serta Kabupaten Wonogiri masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui intensidikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung penerimaan daerah, serta pengelolaan aset daerah secara produktif dan transparan.

Fluktuasi rasio selama lima tahun tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan faktor internal berupa transisi serta implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah. Peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 17,27% diduga merupakan hasil intensifikasi pemungutan PBB-P2, BPHTB, dan revisi tarif retribusi melalui Perbup Nomor 74 Tahun 2022. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan kemandirian fiskal, diperlukan konsistensi penerapan kebijakan pajak dan retribusi, pendampingan desa dalam pemungutan pajak, serta diversifikasi sumber PAD berbasis potensi lokal (https://wonogirikab.go.id dan https://peraturan.bpk.go.id ).

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan penilaian *Value for Money*

**Tabel 3**
**Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**
**Bedasarkan Penilaian *Value for Money* Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD (Rupiah) | Anggaran PAD (Rupiah) | Hasil (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 274.290.000.000 | 252.340.000.000 | 108,70 | Sangat Efektif |
| 2021 | 241.300.000.000 | 258.240.000.000 | 93,44 | Efektif |
| 2022 | 332.810.000.000 | 251.870.000.000 | 132,14 | Sangat Efektif |
| 2023 | 249.530.000.000 | 256.300.000.000 | 97,36 | Efektif |
| 2024 | 306.540.000.000 | 283.770.000.000 | 108,02 | Sangat Efektif |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas bahwa tingkat kinerja efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2020-2024 cukup baik dan cenderung stabil. Tahun 2020, capaian PAD mencapai 108,70% tergolong sangat efektif. Kemudian di tahun 2021 tingkat pencapaian PAD turun menjadi 93,44% dan masuk ke dalam kriteria efektif. Tahun 2022 PAD meningkat mencapai 132,14% tergolong sangat efektif. Tahun 2023 juga menunjukkan kembali mengalami penurunan menjadi 97,36% namun masih dikriteria efektif. Sementara pada tahun 2024, realisasi PAD kembali meningkat menjadi 108,02% dengan kriteria sangat efektif.

Perubahan kriteria efektivitas dari sangat efektif menjadi efektif, kemudian kembali ke kriteria sangat efektif, mencerminkan fluktuasi rasio tetap terjadi, tetapi secara umum pemerintah Kabupaten Wonogiri mampu merealisasikan PAD secara baik, bahkan melebihi target di sebagian besar tahun. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024, kinerja pengelolaan PAD berada pada kriteria sangat efektif. Penurunan yang terjadi salah satunya dipengaruhi oleh masa transisi kelembagaan PT BPR Giri Sukadana menjadi Perseroda yang ditargetkan dapat meningkatkan kontribusi PAD, namun dampaknya belum maksimal pada tahun 2021 ( https://jatengprov.go.id ).

Secara keseluruhan, tren efektivitas PAD Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan, tidak hanya bergantung pada kebijakan pajak dan tarif, tetapi juga terkait kuat dengan inovasi layanan, pengembangan lembaga daerah, dan optimalisasi aset serta potensi lokal dengan capaian yang konsisten memenuhi bahkan melebihi target pada sebagian besar tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, penguatan kelembagaan daerah, dan inovasi pelayanan publik berperan besar dalam menjaga kinerja fiskal daerah tetap berada pada level yang efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berdasarkan penilaian *Value for Money*

**Tabel 4**
**Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**
**Berdasarkan Penilaian *Value for Money* Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja (Rupiah) | Realisasi Pendapatan (Rupiah) | Hasil (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.262.810.000.000 | 2.273.680.000.000 | 99.52 | Kurang Efisien |
| 2021 | 2.297.510.000.000 | 2.303.560.000.000 | 99,74 | Kurang Efisien |
| 2022 | 2.243.210.000.000 | 2.262.260.000.000 | 99,16 | Kurang Efisien |
| 2023 | 2.269.800.000.000 | 2.351.130.000.000 | 96,54 | Kurang Efisien |
| 2024 | 2.314.190.000.000 | 2.473.360.000.000 | 93,56 | Kurang Efisien |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas bahwa tingkat kinerja efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan kondisi yang belum optimal. Tahun 2020, tingkat efisiensi tercatat 99,52% dengan kriteria kurang efisien. Tahun 2021 mencapai di 99,74%. Tahun 2022 masih sama dengan angka 99,16%. Namun di tahun 2023 sempat menunjukkan perbaikan dengan capaian 96,54% tapi masih dikriteria kurang efisien, begitupun di tahun 2024 masih tetap berada di angka 93,56%. Lima tahun berturut-turut masih berada dalam kriteria kurang efisien.

Rasio efisiensi pada tahun anggaran 2020-2022 sangat tinggi, hampir mendekati 100%, namun masih belum bisa di kriteria efisien secara optimal karena penggunaan belanja hampir mengimbangi pendapatan. Kemudian terjadi penurunan efisiensi secara progresif pada tahun 2023 mencapai 96,54% dan 2024 mencapai 93,56%. Rasio efisiensi lebih dari 90% mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan habis untuk belanja, sehingga ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah sangat terbatas. Dalam kondisi ideal, efisiensi anggaran sebaiknya berada di bawah 90%, agar terdapat sisa anggaran untuk cadangan, pengembangan infrastruktur, atau belanja modal. Tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonogiri masih tergolong kurang efisien dengan rata-rata nilai rasio 97,70%, menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja, sehingga ruang untuk penghematan maupun alokasi ulang anggaran relatif sempit.

Upaya penurunan yang terjadi tahun 2023 dan 2024 selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah daerah, termasuk pemangkasan belanja operasional DPRD (www.fokusjateng.com). Rasionalisasi anggaran program seperti beasiswa mahasiswa dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp7.500.000.000, dan pengurangan alokasi pembangunan infrastruktur akibat pemotongan anggaran hingga

Rp63.000.000.000 (www.fokuswonogiri.com). Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mempertahankan layanan publik prioritas seperti Pendidikan dan kesehatan, bahkan melakukan inovasi seperti peluncuran platform *Skillgrab* oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menjaga keberlangsungan pelatihan masyarakat di tengah keterbatasan dana.

5. Rasio Ekonomis Keuangan Daerah berdasarkan penilaian *Value for Money*

**Tabel 5**
**Perhitungan Rasio Ekonomis Keuangan Daerah**
**Berdasarkan Penilaian *Value for Money* Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja (Rupiah) | Anggaran Belanja (Rupiah) | Hasil (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.262.810.000.000 | 2.479.910.000.000 | 91,25 | Ekonomis |
| 2021 | 2.297.510.000.000 | 2.402.580.000.000 | 95,63 | Ekonomis |
| 2022 | 2.243.210.000.000 | 2.293.570.000.000 | 97,80 | Ekonomis |
| 2023 | 2.269.800.000.000 | 2.540.530.000.000 | 89,34 | Cukup Ekonomis |
| 2024 | 2.314.190.000.000 | 2.697.160.000.000 | 85,80 | Cukup Ekonomis |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat ekonomi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan pengelolaan anggaran yang stabil, dengan rasio belanja di bawah 100% dari anggaran. Tahun 2020, tingkat ekonomi belanja tercatat sebesar 91,25% dan berada di kriteria ekonomis. Kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 95,63% namun masih berada di kriteria ekonomis. Tahun 2022 mengalami kenaikan tertinggi mencapai 97,80% dan berada di kriteria ekonomis. Sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan mencapai 89,34% yang di kriteriakan cukup ekonomis. Sementara pada tahun 2024, tingkat ekonomi belanja berada di angka 85,80% dan juga tergolong cukup ekonomis.

Perubahan kriteria ekonomis belanja daerah Kabupaten Wonogiri dari ekonomis di tahun 2020, 2021, 2022 menjadi cukup ekonomis pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan selama tiga tahun pertama tergolong ekonomis, dengan realisasi belanja tidak melebihi anggaran. Nilai rasio terus menurun mencerminkan pengendalian belanja yang lebih ketat. Rasio ekonomis yang stabil menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengontrol belanja dan menghindari pemborosan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja yang hemat tetap menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan program.

6. Rasio Keserasian Keuangan Daerah

**Tabel 6**
**Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Operasi (Rupiah) | Realisasi Belanja (Rupiah) | Hasil (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.569.520.000.000 | 2.262.810.000.000 | 69,36 |
| 2021 | 1.542.900.000.000 | 2.297.510.000.000 | 67,16 |
| 2022 | 1.583.570.000.000 | 2.243.210.000.000 | 70,59 |
| 2023 | 1.532.720.000.000 | 2.269.800.000.000 | 67,53 |
| 2024 | 1.696.250.000.000 | 2.314.190.000.000 | 73,30 |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat Tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp1.569.520.000.000 dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp2.262.810.000.000, sehingga rasio belanja operasi mencapai 69,36%. Tahun 2021, realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp1.542.900.000.000 dari total belanja daerah Rp2.297.510.000.000 atau setara 67,16%. Kemudian pada tahun 2022, proporsi belanja operasi naik menjadi 70,59% dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp1.583.570.000.000 dan total belanja daerah sebesar Rp2.243.210.000.000. Tahun 2023 mencatat rasio belanja operasi sebesar 67,53% dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp1.532.720.000.000 dari total belanja sebesar Rp2.269.800.000.000. Kemudian pada tahun 2024, belanja operasi terealisasi sebesar Rp1.696.250.000.000 dengan total belanja Rp2.314.190.000.000, menghasilkan rasio sebesar 73,30%.

Secara nominal realisasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial, dan subsidi dalam periode anggaran 2020-2024 rentang rasio belanja operasi Kabupaten Wonogiri berada di antara 67%-73%, dengan rata-rata sekitar 69,99% dalam lima tahun terakhir. Rasio belanja operasi di atas 70% menunjukkan dominan belanja rutin yang kurang mendukung penguatan kapasitas ekonomi daerah (Kuniawan & Syafitri, 2021). Tingginya porsi belanja operasi dapat membatasi ruang fiskal daerah untuk meningkakan belanja modal yang bersifat produktif. Hal ini berarti Kabupaten Wonogiri di tahun anggaran 2022 dan 2024 banyak melakukan belanja rutin. Sehingga pemerintah daerah disarankan untuk menyeimbangkan alokasi belanja operasi dengan belanja modal yang mendukung pembangunan jangka panjang, agar kinerja keuangan daerah dapat lebih sehat dan berkelanjutan.

**Tabel 7**
**Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| Tahun Anggaran | Realisasi Belanja Modal (Rupiah) | Realisasi Belanja (Rupiah) | Hasil (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 291.300.000.000 | 2.262.810.000.000 | 12,87 |
| 2021 | 364.810.000.000 | 2.297.510.000.000 | 15,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 301.740.000.000 | 2.243.210.000.000 | 13,45 |
| 2023 | 368.610.000.000 | 2.269.800.000.000 | 16,24 |
| 2024 | 203.280.000.000 | 2.314.190.000.000 | 8,78 |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Berdasarkan di atas dapat dilihat, tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp291.310.000.000 dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp2.262.810.000.000, sehingga rasio belanja modal mencapai 12,87%. Tahun 2021, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp364.810.000.000 dari total belanja daerah Rp2.297.510.000.000 atau setara 15,88%. Kemudian pada tahun 2022, proporsi belanja modal turun menjadi 13,45% dengan realisasi belanja modal sebesar Rp301.740.000.000 dan total belanja daerah sebesar Rp2.243.210.000.000. Tahun 2023 mencatat rasio belanja modal mencapai 16,24% dengan realisasi belanja modal sebesar Rp368.610.000.000 dari total belanja sebesar Rp2.269.800.000.000. Kemudian pada tahun 2024, belanja modal terealisasi sebesar Rp203.280.000.000 dengan total belanja Rp2.314.190.000.000, menghasilkan rasio sebesar 8,78%.

Berdasarkan uraian di atas porsi belanja modal idealnya mencapai 20%-30% dari total belanja untuk menjamin pertumbuhan aset produktif dan infrastruktur. Nilai belanja modal pada Kabupaten Wonogiri yang berada di bawah 17% menunjukkan alokasi pembangunan yang masih rendah, sehingga potensi pertumbuhan jangka panjang masih terbatas. Rendahnya belanja modal dapat menurunkan daya dorong ekonomi daerah karena berkurangnya investasi pemerintah pada infrastruktur, peralatan, dan aset 2885ublic yang mendukung produktivitas. Data ini selaras dengan tingginya rasio belanja operasi yang mencapai 67%-73% pada tahun 2020-2024.

7. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024

**Tabel 8**
**Rasio Pertumbuhan Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**
**(Disajikan dalam Rupiah)**

| **Keterangan** | **Tahun** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| PAD | 274.290.000.000 | 241.300.000.000 | 332.810.000.000 | 249.530.000.000 | 306.540.000.000 |
| **Pertumbuhan PAD** | **-4,50%** | **-12,03%** | **37,93%** | **-25,02%** | **22,84%** |
| Pendapatan | 2.273.680.000.000 | 2.303.560.000.000 | 2.262.260.000.000 | 2.351.130.000.000 | 2.473.360.000.000 |
| **Pertumbuhan Pendapatan** | **-6,92%** | **1,31%** | **-1,79%** | **3,93%** | **5,20%** |
| Belanja Operasi | 1.569.520.000.000 | 1.542.900.000.000 | 1.583.570.000.000 | 1.532.720.000.000 | 1.696.250.000.000 |

| Keterangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Pertumbuhan Belanja Operasi** | **3,43%** | **-1,70%** | **2,64%** | **-3,21%** | **10,67%** |
| Belanja Modal | 291.310.000.000 | 364.810.000.000 | 301.740.000.000 | 368.610.000.000 | 203.280.000.000 |
| **Pertumbuhan Belanja Modal** | **-48,44%** | **25,32%** | **-17,29%** | **22,16%** | **-44,86%** |

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id dan Data diolah, 2025

Tahun 2020 PAD mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,50%, namun mengalami penurunan yang lebih tajam kembali pada tahun 2021 sebesar -12,03%, kemudian pada tahun 2022 mengalami lonjakan kenaikan menjadi 37,93%. Tahun 2023 mengalami penurunan drastis kembali menjadi -25,02% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi titik pemulihan kembali menjadi 22,84%. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Wonogiri selama lima tahun terakhir adalah sebesar 3,84%. Lonjakan pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh mulai pulihnya kegiatan eknomi pasca pandemi dan penerapan kebijakan inovatif pemerintah kabupaten Wonogiri, seperti optimalisasi sistem pembayaran pajak daerah secara digital dan penertiban objek retribusi.

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri selama tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi, namun cenderung mengalami perbaikan pada du tahun terakhir. Tahun 2020, pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar -6,92%. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi dan berkurangnya sumber pendapatan, meskipun tahun 2021 menunjukkan sedikit perbaikan dengan pertumbuhan 1,31% mencerminkan awal pemulihan ekonomi meskipun masih terbatas akibat adanya kebijakan pembatasan sosial.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2020-2024 adalah 0,35%, angka ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan PAD. Tahun 2020, belanja operasi tumbuh sebesar 3,43%, peningkatan ini erat kaitannya dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, yang memerlukan tambahan pembiayaan pada sektor kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan operasional pemerintahan. Jika dilihat maka dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 memperlihatkan kriteria yang fluktuatif pada seluruh komponen, baik pada PAD, pendapatan daerah, belanja operasi, maupun belanja modal. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan, menekankan pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah

Berdasarkan pertumbuhan ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu memperkuat diversifikasi sumber PAD, menjaga konsistensi pertumbuhan pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja operasi, dan menstabilkan belanja modal.

**Rangkuman Hasil Penelitian**

**Tabel 9**
**Rangkuman Hasil Penelitian Kabupaten Wonogiri**
**Tahun Anggaran 2020-2024**

| No | Rasio | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | 12,06% | 10,47% | 14,71% | 10,61% | 12,39% |
| | **Pola Hubungan** | **Kurang** | **Kurang** | **Kurang** | **Kurang** | **Kurang** |
| 2. | Rasio Kemandirian | 14,54% | 12,52% | 17,27% | 11,88% | 14,15% |
| | **Pola Hubungan** | **Instruktif** | **Instruktif** | **Instruktif** | **Instruktif** | **Instruktif** |
| 3. | Rasio Efektivitas | 108,70% | 93,44% | 132,14% | 97,36% | 108,02% |
| | **Pola Hubungan** | **Sangat Efektif** | **Efektif** | **Sangat Efektif** | **Efektif** | **Sangat Efektitf** |
| 4. | Rasio Efisiensi | 99,52% | 99,74% | 99,16% | 96,54% | 93,56% |
| | **Pola Hubungan** | **Kurang Efisien** | **Kurang Efisien** | **Kurang Efisien** | **Kurang Efisien** | **Kurang Efisien** |
| 5. | Rasio Ekonomis | 91,52% | 95,63% | 97,80% | 89,34% | 85,80% |
| | **Pola Hubungan** | **Ekonomis** | **Ekonomis** | **Ekonomis** | **Cukup Ekonomis** | **Cukup Ekonomis** |
| 6. | Rasio Operasi Belanja | 69,36% | 67,16% | 70,59% | 67,16% | 73,30% |
| 7. | Rasio Belanja Modal | 12,87% | 15,88% | 13,45% | 16,24% | 8,78% |
| 8. | Pertumbuhan PAD | -4,50% | -12,03% | 37,93% | -25,02% | 22,84% |
| 9. | Pendapatan | -6,92% | 1,31% | -1,79% | 3,93% | 5,20% |
| 10. | Belanja Modal | -48,44% | 25,32% | -17,29% | 22,16% | -44,86% |
| 11. | Belanja Operasi | 3,43% | -1,70% | 2,64% | -3,21% | 10,67% |

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif setiap tahunnya, yaitu rata-

rata rasio selama lima tahun sebesar 12,05% yang mengindikasikan jika proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif rendah, karena belum melampaui ambang batas ideal 50% bahwa Kabupaten Wonogiri masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, sehingga ruang gerak dalam pengambilan keputusan pembangunan berbasis PAD terbatas, maka diperlukannya strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan baik melalui peningkatan kinerja pajak daerah, serta efisiensi belanja operasi dan stabilisasi belanja modal, agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dari tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan rata-rata sebesar 14,07% dan kriteria instruktif. Ini mencerminkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Rasio Efektivitas menunjukkan nilai yang konsisten selama lima tahun. Rata-rata efektivitas selama lima tahun adalah 107,93%, yang menunjukkan kinerja penerimaan PAD relatif baik karena menunjukkan kriteria sangat efektif, yang berarti target pendapatan daerah sebagian besar tercapai bahkan terlampaui dan menunjukkan adanya upaya pengelolaan pendapatan yang efektif sesuai prinsip *Value for Money*, yaitu keberhasilan mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Rasio Efisiensi Kabupaten Wonogiri dalam lima tahun menunjukkan rata-rata sebesar 97,70% yang tergolong kriteria kurang efisien setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya atau belanja yang digunakan untuk memperoleh pendapatan relatif besar dibandingkan hasil yang diperoleh. Kinerja efisiensi Kabupaten Wonogiri dinilai belum optimal, pemerintah daerah perlu memperbaiki strategi pengelolaan keuangan, terutama dalam pengendalian biaya dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya agar target dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah.

Rasio Ekonomis Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 memiliki rata-rata rasio sebesar 91,96% yang tergolong kriteria ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri relatif mampu mengelola biaya untuk mendapatkan input, tetapi konsistensi perlu ditingkatkan, terutama dengan menerapkan strategi pengadaan yang lebih efisien, meminimalkan pemborosan, serta memperkuat pengendalian anggaran.

Rasio kerserasian tahun anggaran 2020-2024, belanja pemerintah Kabupaten Wonogiri masih didominasi oleh belanja operasi. Rata-rata rasio belanja operasi sebesar 69,59%, sedangkan rata-rata belanja modal hanya sebesar 13,45%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja barang/jasa dibandingkan dengan belanja investasi seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset.

Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Wonogiri menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan PAD selama lima tahun adalah 3,84%. Sebaliknya, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah secara keseluruhan hanya sebesar 0,35%, yang berarti masih cukup rendah. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan belanja operasi adalah 2,73%, dan belanja modal sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 6,75%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Zulkarnain (2020), yang menemukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah dengan kriteria instruktif. Kondisi tersebut menandakan ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat dan ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur pembiayaan pembangunan masih terbatas. Kemudian penelitian Nansi et al., (2025) yang menemukan bahwa Kota Yogyakarta mampu mencapai rasio efektivitas di atas 100%,

yang berarti target pendapatan daerah tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Temuan-temuan tersebut dapat memperkuat hasil analisis di Kabupaten Wonogiri.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan hasil yang kurang karena belum mampu memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah secara mandiri. Pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten masuk ke dalam kriteria instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah. Rasio Efektivitas dengan penilaian *Value for Money* pada Kabupaten Wonogiri sangat efektif, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai dan terlampaui. Rasio Efisiensi dengan penilaian *Value for Money* pada Kabupaten Wonogiri tergolong kriteria kurang efisien dengan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum dilakukan secara optimal, karena realisasi biaya belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Rasio Ekonomis dengan penilaian *Value for Money* pada Kabupaten Wonogiri berada pada kriteria Ekonomis dengan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri relatif mampu mengelola biaya belanja daerah walaupun belum sepenuhnya dilakukan secara hemat dan efisien. Rasio Keserasian pada Kabupaten Wonogiri menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih dominan atau diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Rasio Pertumbuhan pada Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang negatif, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri lebih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal dapat diartikan pemerintah daerah belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan dari tahun ke tahun berikutnya.

### Saran Penelitian

Implikasi terhadap Akuntansi Sektor Publik, Analisis Kinerja Keuangan Daerah akan meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis, Keserasian terhadap Belanja Daerah, dan Pertumbuhan PAD Daerah diharapkan melakukan inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan lebih mengutamakan belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri perlu terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah. Selain itu, meningkatkan kinerja BUMD dan pengelolaan aset daerah secara produktif, untuk meminimalisir pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak optimal. Maka, perlu memperkuat manajemen keuangan daerah dengan pengendalian belanja rutin, strategi efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa dan perencanaan serta merancang kebijakan anggaran yang lebih proposional antara belanja operasi dan belanja modal. Masyarakat daerah Kabupaten Wonogiri diharapkan untuk berperan dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Masyarakat diharapkan lebih taat dan tepat waktu dalam membayar pajak maupun retribusi daerah. Serta masyarakat dapat membantu daerah dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, UMKM, pariwisata, maupun industri kreatif.Bagi Penelitian selanjutnya disarankan agar periode yang

dianalisis diperluas mencakup tahun-tahun berikutnya, agar penelitian lebih menyeluruh dan memperluas subyek penelitian agar dapat dibandingkan dengan keuangan daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA


Awani, M., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *3*(2), 95-102.

Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(2), 126-134. https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.50

Hantono. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Lestari, D. A., & Nugroho, A. H. (2021). *Pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap peningkatan IPM di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45-59.

Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogayakarta: UPP STIM YKPN.

Majid, Jamaluddin. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Muslim, C., Saenong, Z., & Hastuti, H. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari 2015-2021. *At Tariiz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(04), 233-240. https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.930

Nansi, M. R., Hidayati, F., Susanti, M. E. N. T., & Dewitasari, R. P. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023. *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *8*(2), 64-75.

Putro, K. M., Suniaprily, F. G. A., & Suharno, S. (2024). Implementasi sistem otonomi daerah di Indonesia beserta dampak penerapannya. *Jurnal Bevinding*, Universitas Balikpapan.

Rustanto, E. A.,Suseno, Y. D., & Sriwidodo, U. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014-2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, *14*(1), 1-27.

Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan MenggunakanMetode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 261-271.

Santoso, R. T., Syukri, M., Ayu, D., & Ermawati, P. (2021). Analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 75-93.

Saragih, F., & Siregar, I., A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Enginerring & Humaniora*, 43-53.

Sawitri, S.H & Usman, S. (2023). Analisis Kinerja Keungan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017-2021. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, *17*(1978), 2443-2454.

Yuliana, L. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 33-42.

Yuliana, L., & Ardiansyah, A. (2020). Peran APBD dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 17-28.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala-Repositori IMWI*, *3*(1), 61-74.

https://djpk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 31 Juli 2025)
https://wonogirikab.go.id (diakses pada tanggal 31 Juli 2025)
https://wonogirikab.bps.go.id (diakses pada tanggal 31 Juli 2025)
https://peraturan.bpk.go.id (diakses pada tanggal 31 Juli 2025)
Radar Solo. (2024). *Pemkab Wonogiri tingkatkan anggaran pelayanan publik di 2024*. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2025), dari https://radarsolo.jawapos.com
Solopos.espos.id. (2025, 10 Agustus). Inilah keistimewaan Wonogiri, ternyata daerah super kaya di Soloraya. Solopos.espos.id. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2025), dari https://solopos.espos.id/inilah-keistimewaan-wonogiri-ternyata-daerah-super-kaya-di-soloraya-1314098
Yandip Prov Jateng. (2024, 9 Agustus). *Wonogiri Raih Penghargaan Sebagai Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia.* Jatengprov.go.id. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2025), dari https://jatengprov.go.id/beritadaerah/wonogiri-raih-penghargaan-sebagai-kabupaten-paling-berkelanjutan-di-indonesia/